

Salasiah, S.Sos., M.Si.
Dra. Sudiyarti, M.Si.



PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK



Editor:

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK

Salasiah, S.Sos., M.Si.

Dra. Sudiyarti, M.Si.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis:

Salasiah, S.Sos., M.Si.

Dra. Sudyarti, M.Si.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 142, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-322-6

Cetakan Pertama:

Februari 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perbandingan Administrasi Publik. Buku ini terdiri dari 15 Bab, ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Perbandingan Administrasi Negara/Publik Sebagai Ilmu

Bab II Pendekatan Dalam Perbandingan Administrasi Negara

Bab III Fokus Studi Perbandingan Administrasi Negara

Bab IV Unsur-Unsur Perbandingan Administrasi Negara

Bab V Kerangka dan Dimensi Perbandingan Administrasi Negara

Bab VI Variasi Sistem Administrasi Negara-Negara di Dunia

Bab VII Variasi Politik di Negara-Negara Berkembang

Bab VIII Transformasi Sistem di Negara-Negara Berkembang

Bab IX Sistem Administrasi Negara-Negara Industri Maju

Bab X Sistem Administrasi Negara-Negara Berkembang

Bab XI Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara

Bab XII Metode Dalam Perbandingan Administrasi Negara

Bab XIII Dasar-Dasar Perbandingan Administrasi Negara

Bab XIV Aspek Perbandingan Administrasi Negara

Seperti peribahasa “*Tiada Gading yang Tak Retak*”, buku ini walaupun sudah ditulis semaksimal mungkin tetapi pasti masih ada kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iv
Daftar Isi	v
Bab I Perbandingan Administrasi Negara/Publik Sebagai Ilmu	
A. Pengertian dan Cakupan Administrasi Negara Sebagai Bidang Ilmu.....	1
B. Kriteria Perbandingan Administrasi Negara Sebagai Bidang Ilmu.....	2
C. Relevansi dan Aplikasi Praktis Dari Studi Perbandingan Administrasi Negara.....	5
D. Hubungan Antara Perbandingan Administrasi Negara dan Administrasi Publik.....	7
Daftar Pustaka	9
Bab II Pendekatan Dalam Perbandingan Administrasi Negara	
A. Pendekatan Institusional.....	11
B. Pendekatan Fungsional (Behavioral)	12
C. Pendekatan Neo-Intitusional Dalam Perbandingan Administrasi Negara.....	14
Daftar Pustaka	17
Bab III Fokus Studi Perbandingan Administrasi Negara	
A. Pendekatan Modified-Traditional.....	19
B. Development-Oriented.....	21
C. General System Model-Building	23
D. Middle-Range Theory Formulation	25
Daftar Pustaka	28
Bab IV Unsur-Unsur Perbandingan Administrasi Negara	
A. Unsur-Unsur Administrasi: Proses Penyelenggaraan, Kerjasama, dan Pencapaian	29
B. Unsur-Unsur Administrasi Negara: Proses Penyelenggaraan Negara, Kerjasama Antar Lembaga, dan Pencapaian Tujuan Negara.....	33
Daftar Pustaka	36

Bab V Kerangka dan Dimensi Perbandingan Administrasi Negara

A. Hubungan Negara-Masyarakat..... 38
B. Hubungan Antara Pembuat Kebijakan dan Birokrasi Dalam
Administrasi Negara..... 40
C. Bentuk Kerja Internal dan Dinamika Organisasi Dalam
Administrasi Negara..... 43
Daftar Pustaka 47

Bab VI Variasi Sistem Administrasi Negara-Negara di Dunia

A. Administrasi Negara-Negara Awal..... 49
B. Administrasi Negara-Negara Industri Maju 51
C. Administrasi Negara-Negara..... 54
Daftar Pustaka 57

Bab VII Variasi Politik di Negara-Negara Berkembang

A. Regim Yang Dipengaruhi Oleh Birokrasi..... 59
B. Regim Politik Yang Menonjolkan Partai-Politik 62
Daftar Pustaka 64

Bab VIII Transformasi Sistem di Negara-Negara Berkembang

A. Modernisasi 66
B. Pembangunan..... 68
C. Perubahan 70
D. Reinventing 71
E. Pemerintahan 72
F. Reformasi 73
Daftar Pustaka 75

Bab IX Sistem Administrasi Negara-Negara Industri Maju

A. Inggris..... 78
B. Amerika Serikat..... 80
C. Jerman 81
D. Jepang..... 82
E. Korea Selatan..... 83
F. Australia 84
G. Rusia..... 86
Daftar Pustaka 87

Bab X Sistem Administrasi Negara-Negara Berkembang

A. China..... 89
B. India 90

C. Singapura.....	91
D. Brasil.....	93
Daftar Pustaka	95
Bab XI Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara	
A. Ruang Lingkup Wilayah/Tempat	97
B. Ruang Lingkup Waktu.....	100
C. Ruang Lingkup Wilayah dan Waktu	104
Daftar Pustaka	107
Bab XII Metode Dalam Perbandingan Administrasi Negara	
A. Metode Induktif.....	111
B. Metode Deduktif	113
C. Manfaat dan Relevansi Metode Perbandingan Adminstrasi Negara.....	114
Daftar Pustaka	118
Bab XIII Dasar-Dasar Perbandingan Administrasi Negara	
A. Manfaat Perbandingan Administrasi Negara/Publik	121
B. Masalah Dalam Melakukan Perbandingan Administrasi Negara/Publik.....	124
C. Sejarah Perbandingan Administrasi Negara/Publik	125
Daftar Pustaka	129
Bab XIV Aspek Perbandingan Administrasi Negara	
A. Bentuk Negara.....	131
B. Bentuk Pemerintahan.....	133
C. Sistem Pemerintahan.....	136
D. Sistem Politik	138
Daftar Pustaka	141
Profil Penulis.....	142

BAB I

PERBANDINGAN

ADMINISTRASI

NEGARA/PUBLIK SEBAGAI

ILMU

A. PENGERTIAN DAN CAKUPAN ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI BIDANG ILMU

Administrasi adalah kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Secara luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan.

Administrasi negara merupakan cabang ilmu yang mempelajari organisasi, proses, dan implementasi kebijakan di dalam suatu negara. Bidang ini memainkan peran kunci dalam membentuk, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi negara mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen birokrasi, perencanaan kebijakan, hingga evaluasi kinerja instansi pemerintah. Dalam esensinya, administrasi negara tidak hanya berfokus pada proses internal pemerintahan, tetapi juga melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Administrasi negara bukan sekadar serangkaian aturan dan prosedur, melainkan juga melibatkan elemen-elemen manusiawi. Aspek kepemimpinan, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian integral dari disiplin ini. (Winarno, 2008)

Sedangkan perbandingan administrasi negara sendiri berasal dari kata “banding/timbang”, yang menentukan “bobot/nilai” dari satu atau beberapa objek tertentu. Dapat dikatakan bahwa perbandingan adalah suatu perbuatan untuk menentukan bobot atau nilai dari satu atau beberapa objek tertentu dengan cara mensejajarkan satu objek dengan objek lainnya, atau satu zaman dengan zaman tertentu, atau satu atau beberapa objek atau zaman dengan suatu alat pembanding tertentu.

Dengan merinci aspek-aspek tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan administrasi negara adalah pendekatan ilmiah yang melibatkan proses menentukan bobot atau nilai dari elemen-elemen administratif dalam suatu negara atau lebih, dengan cara mensejajarkan satu elemen dengan elemen lainnya. Pendekatan ini mencakup perbandingan sistem pemerintahan, kebijakan publik, kinerja birokrasi, dan konteks budaya di berbagai negara. Dengan demikian, perbandingan administrasi negara membantu kita memahami persamaan dan perbedaan dalam praktek administratif, mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam konteks globalisasi.

B. KRITERIA PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI BIDANG ILMU

Administrasi, dalam konteks manajemen, dapat diartikan sebagai seni atau cara bagaimana individu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, manajemen berperan sebagai motor penggerak, sementara pencapaian tujuan memerlukan keahlian teknis atau managerial skill. Sebagai bidang ilmu, administrasi negara memiliki kriteria-kriteria tertentu yang menjadikannya sebagai disiplin pengetahuan yang terstruktur.

Pertama, administrasi negara dapat dianggap sebagai sekelompok pengetahuan yang teratur mengenai suatu hal atau bidang. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap struktur, proses, dan fungsi-fungsi yang melekat dalam administrasi negara. Untuk meneguhkan pernyataan ini, Dimock (2010) menyoroti bahwa keberhasilan suatu administrasi negara tidak hanya ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip administratif yang berlaku.

Kedua, administrasi negara memiliki berbagai konsep yang telah terbukti kebenarannya. Konsep-konsep ini muncul sebagai pedoman bagi praktisi dan akademisi dalam memahami serta menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam konteks administrasi negara. Sebagai contoh, konsep *good governance* dan *rule of law* telah terbukti relevan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam suatu pemerintahan (Satria, 2015).

Selanjutnya, administrasi negara dituntut untuk memiliki metode yang dapat mencapai kebenaran. Metode tersebut didasarkan pada sifat-sifat empiris, sistematis, obyektif, analitis, dan dapat diuji kebenarannya. Dalam hal ini, metode penelitian menjadi instrumen utama untuk menggali dan menghasilkan pengetahuan baru dalam administrasi negara. Suharto (2018) menggarisbawahi pentingnya penerapan metode penelitian yang berkualitas guna memastikan bahwa setiap temuan atau kesimpulan yang dihasilkan dapat diandalkan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu administrasi negara.

Dengan demikian, administrasi negara bukan sekadar kumpulan praktik-praktik administratif, melainkan sebuah bidang ilmu yang terorganisir dan terstruktur. Dengan menjunjung tinggi kriteria-kriteria di atas, ilmu administrasi negara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan kebijakan dan memajukan tata kelola pemerintahan.

Pembahasan tentang apakah perbandingan administrasi negara itu ilmu atau bukan, maka akan terbentur pada masalah definisi dan teori

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, H. (2018). "Administrasi Negara: Sebuah Pengantar." Jakarta: Kencana.
- Dimock, M. A. (2010). Public administration: An introduction. Washington D. C :CQ Press.
- Nugroho, Riant. (2015). Comparative Public Administration. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasojo, Eko. (2008). Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pratikno, P. (2009). Administrasi Negara dan Pemerintahan. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satria, H. (2015). Good governance and rule of law: A case study of Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 5(4),
- Suharto, B. (2018). Metode Penelitian Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia.
- Winarno, B. (2008). Ilmu Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : PT. Remaja Rosdakarya.

BAB II

PENDEKATAN DALAM

PERBANDINGAN

ADMINISTRASI NEGARA

Pada bab ini, kita akan mengenal tiga pendekatan utama dalam perbandingan administrasi negara: pendekatan institusional, pendekatan fungsional (behavioral), dan pendekatan neo-institusional. Ketiga pendekatan ini merupakan alat analisis penting yang sangat membantu dalam memahami perbandingan administrasi negara secara lebih terfokus dan sistematis.

Pendekatan Institusional berfokus pada peran dan struktur institusi dalam sistem administrasi negara. Ini mencakup organisasi pemerintah, aturan, struktur, dan peraturan yang mengatur tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana perbedaan dalam struktur dan peran institusi-administrasi memengaruhi pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik.

Pendekatan Fungsional (Behavioral) berfokus pada perilaku dan tindakan dalam administrasi negara. Ini menganalisis bagaimana pegawai pemerintah dan pemimpin berinteraksi, mengambil keputusan, dan merespons tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan ini membantu kita memahami aspek manusia dalam administrasi negara dan bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi kinerja pemerintah.

Pendekatan Neo-Institusional menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan sebelumnya, dengan fokus pada peran institusi dan perilaku dalam administrasi negara. Ini menekankan bahwa institusi dan perilaku tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman sistem administrasi negara. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat menganalisis bagaimana interaksi antara institusi dan perilaku menciptakan tata kelola publik yang efektif atau menghambatnya.

Melalui eksplorasi ketiga pendekatan ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang administrasi negara dan memahami bagaimana berbagai faktor memengaruhi tata kelola publik.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ketiga pendekatan ini, kita akan memiliki dasar yang kuat untuk menganalisis dan memahami administrasi negara di berbagai negara. Ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan tata kelola yang lebih baik dan efisien.

A. PENDEKATAN INSTITUSIONAL

Pendekatan institusional adalah cara kita memeriksa peran dan pengaruh institusi dalam mengelola urusan pemerintah. Ketika kita bicara tentang institusi di sini, maksudnya adalah berbagai lembaga pemerintah, peraturan, dan organisasi yang mengatur cara pemerintah bertindak dan membuat kebijakan. Dengan pendekatan ini, kita bisa lebih memahami bagaimana institusi-institusi ini mempengaruhi cara pemerintah membuat kebijakan, menjalankannya, dan mempengaruhi masyarakat.

Menurut Rosenbloom dan Kravchuk (2007), pendekatan institusional bisa dijelaskan seperti ini:

1. Struktur Institusi

Ini berarti kita melihat bagaimana lembaga-lembaga pemerintah diorganisasi, seperti kementerian, badan, dan lembaga serupa. Perbedaan dalam cara lembaga-lembaga ini diatur bisa sangat mempengaruhi cara keputusan dibuat dan kebijakan dijalankan.

2. Peran Institusi

Berbagai institusi pemerintah memiliki tugas yang berbeda dalam mengelola urusan publik. Beberapa bertanggung jawab untuk merencanakan kebijakan, sementara yang lain memonitor dan mengevaluasi. Memahami peran berbeda ini membantu kita mengerti apa yang dikerjakan oleh administrasi negara.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah sekelompok nilai, norma, dan etika yang ada di dalam institusi-administrasi. Budaya ini bisa mempengaruhi perilaku pegawai pemerintah dan cara kebijakan dijalankan. Pendekatan institusional sering digunakan untuk membandingkan bagaimana berbagai negara mengelola urusan pemerintah. Sebagai contoh, membandingkan sistem administrasi negara di negara demokratis dengan yang otoriter membantu kita memahami bagaimana peran institusi mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas di negara demokratis, sedangkan di negara otoriter, institusi-administrasi bisa lebih sentralistik dan otoriter

Salah satu contoh studi relevan adalah penelitian oleh Hall dan Taylor (1996) yang membandingkan sistem administrasi negara di negara-negara Skandinavia dengan Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa perbedaan dalam struktur institusi dan budaya organisasi memengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat.

Dalam era globalisasi dan perubahan sosial, pendekatan institusional juga membantu kita memahami bagaimana lembaga pemerintah harus beradaptasi dengan tantangan baru dan mencapai tujuan yang lebih baik dalam melayani masyarakat.

B. PENDEKATAN FUNGSIONAL (BEHAVIORAL)

Pendekatan fungsional, juga dikenal sebagai pendekatan behavioral dalam perbandingan administrasi negara, adalah salah satu metode analisis yang memusatkan perhatian pada perilaku manusia dan interaksi

DAFTAR PUSTAKA

- Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386-405.
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936-957.
- McCourt, W., & Needham, C. (2016). *Motivation in public management: The call of public service*. Oxford University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- O'Toole, L. J., & Meier, K. J. (2011). *Public management in intergovernmental networks: Matching structural networks and managerial networking*. Georgetown University Press.
- Rainey, H. G. (2009). *Understanding and managing public organizations (5th ed.)*. Jossey-Bass.
- Rosenbloom, D. H., & Kravchuk, R. S. (2007). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- Williamson, O. E. (1975). *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*. Free Press.

BAB III

FOKUS STUDI

PERBANDINGAN

ADMINISTRASI NEGARA

Dalam dunia perbandingan administrasi negara, ada beragam pendekatan dan bidang studi yang membantu peneliti dan praktisi untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik administratif di berbagai negara. Empat pendekatan utama yang akan kita bahas dalam Bab ini adalah:

Pendekatan Modifikasi-Tradisional: Ini adalah pendekatan yang mempertahankan unsur-unsur tradisional dalam perbandingan administrasi negara, tetapi dengan penekanan pada modifikasi yang memperhitungkan perkembangan baru dalam administrasi publik. Ini melibatkan perbandingan prinsip-prinsip dasar administrasi negara dengan penyesuaian terhadap dinamika modern dan tantangan yang muncul.

Pendekatan Berorientasi Pembangunan: Fokusnya adalah administrasi negara dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Ini mencakup analisis bagaimana administrasi negara memengaruhi proses pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan.

Pembangunan Model Sistem Umum, Pendekatan ini memanfaatkan teori sistem dalam perbandingan administrasi negara. Ini melibatkan pengembangan model sistem yang menggambarkan interaksi antara

berbagai elemen dalam administrasi negara dan bagaimana sistem ini memengaruhi hasil dan kinerja pemerintah.

Formulasi Teori Tengah-Tingkat, Fokusnya adalah pengembangan teori tengah-tingkat yang memberikan wawasan konkret tentang isu-isu administrasi negara tertentu. Ini melibatkan formulasi teori yang lebih spesifik daripada teori umum, namun lebih umum daripada teori yang sangat terperinci.

Dengan mempelajari keempat pendekatan ini, kita akan memahami bagaimana penelitian perbandingan administrasi negara berkisar pada berbagai aspek, mulai dari praktik tradisional hingga perkembangan modern, serta dampak administrasi negara pada pembangunan dan sistem yang kompleks.

A. PENDEKATAN MODIFIED-TRADITIONAL

Dalam memahami sistem dan praktik administrasi di berbagai negara, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Salah satu pendekatan yang menarik untuk dipelajari adalah pendekatan Modified-Traditional. Pendekatan ini mencoba menggabungkan unsur-unsur dari pendekatan tradisional dengan modifikasi yang diperlukan untuk memahami administrasi negara yang lebih modern.

Pendekatan Modified-Traditional dalam perbandingan administrasi negara berfokus pada pemahaman berbagai elemen administrasi negara dalam kerangka kerja yang mencakup unsur tradisional, namun juga mempertimbangkan perubahan dan perkembangan dalam konteks administrasi publik modern.

Pendekatan Modified-Traditional menekankan pemahaman elemen-elemen dasar administrasi negara yang berakar dalam sejarah, namun juga menyadari pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman. Sebagian besar pendekatan ini didasarkan pada teori administrasi dan pemahaman historis tentang bagaimana administrasi negara berkembang dari masa lalu hingga sekarang.

Salah satu aspek utama yang ditekankan oleh pendekatan Modified-Traditional adalah pentingnya tradisi administratif dalam membentuk administrasi negara suatu negara. Beberapa peneliti, seperti Riggs (1964), menyoroti konsep "administrative tradition," yang merujuk pada warisan historis dan budaya administratif suatu negara. Pendekatan Modified-Traditional mencoba memahami bagaimana tradisi administratif masa lalu masih mempengaruhi sistem administrasi negara saat ini.

Sebagai contoh, dalam beberapa negara yang memiliki tradisi administratif yang kuat, seperti Prancis, administrasi negara masih sangat terkait dengan sistem birokrasi yang kuat dan sentralisasi. Di sisi lain, negara-negara dengan tradisi administratif yang lebih terdesentralisasi, seperti Amerika Serikat, cenderung memiliki sistem administrasi negara yang lebih terdesentralisasi.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan Modified-Traditional juga mengakui bahwa perubahan telah terjadi dalam administrasi negara. Modernisasi, globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial telah berdampak signifikan pada cara administrasi negara beroperasi. Pendekatan ini memasukkan elemen-elemen yang mencerminkan perubahan ini dalam analisis perbandingan administrasi negara.

Dalam karya Pollitt (2003), dijelaskan bahwa administrasi publik modern lebih berfokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Pendekatan Modified-Traditional berusaha mengintegrasikan pemahaman tentang perubahan ini dalam kerangka kerja perbandingan administrasi negara. Ini berarti bahwa dalam analisis perbandingan, kita tidak hanya memahami sejarah dan tradisi administratif suatu negara, tetapi juga bagaimana negara tersebut beradaptasi dengan tuntutan dan tantangan zaman sekarang.

Pendekatan Modified-Traditional juga dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan dalam praktik administrasi negara. Misalnya, dalam menganalisis sistem pelayanan kesehatan di berbagai negara, pendekatan ini dapat membantu kita memahami bagaimana tradisi administratif dan nilai-nilai budaya memengaruhi desain dan

DAFTAR PUSTAKA

- Ackoff, R. L. (2010). *Systems Thinking for Curious Managers*. Triarchy Press.
- Dwivedi, Y., Wade, M. R., & Schneberger, S. L. (2006). E-Government and Public Sector Process Rebuilding: Dilettantes, Wheel Barrows, and Diamonds. *Information Systems Management*, 23(3), 7-22.
- Dye, T. R. (2001). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Farazmand, A. (2002). *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Greenwood Publishing Group.
- Pollitt, C. (2003). Joined-up Government: A Survey. *Political Studies Review*, 1(1), 34-49.
- Riggs, F. W. (1964). The Ecology of Public Administration. *Public Administration Review*, 24(2), 89-98.
- Senge, P. M. (1994). *Systems Thinking, Systems Practice*. Wiley.
- Weidner, E. W., & Crum, D. G. (2003). *Development Administration: From Underdevelopment to Sustainable Development*. CRC Press.

BAB IV

UNSUR-UNSUR PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA

Dalam hamparan kompleksitas administrasi negara, kita dihadapkan pada lanskap yang dipenuhi dengan keanekaragaman sistem dan tata kelola pemerintahan. Meskipun tiap negara memiliki karakteristik uniknya, perbandingan unsur-unsur administrasi negara menjadi sebuah jendela yang memungkinkan kita melihat lebih dalam, memahami, dan menganalisis bagaimana suatu pemerintahan diorganisir dan dijalankan.

A. UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI: PROSES PENYELENGGARAAN, KERJASAMA, DAN PENCAPAIAN

Administrasi negara, sebagai fondasi utama dari suatu pemerintahan merupakan medan yang kompleks di mana tiga unsur kunci berinteraksi untuk membentuk keberhasilannya. Proses penyelenggaraan, kerjasama, dan pencapaian menjadi serangkaian elemen yang tidak dapat dipisahkan, membentuk kekuatan yang mendukung dan membimbing perjalanan pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Berikut ini penjelasan lengkapnya :

1. Proses Penyelenggaraan

Proses penyelenggaraan adalah tonggak utama dalam perjalanan administrasi negara. Ini bukan hanya serangkaian langkah

administratif, tetapi sebuah cerita yang dimulai dari perencanaan yang cermat. Mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi, pengawasan, dan evaluasi, proses ini menuntun pemerintah dalam merespons dan menjawab dinamika masyarakat. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan menjadi dasar dari proses penyelenggaraan yang sukses.

2. Kerjasama

Kerjasama bukan lagi sekadar pilihan, tetapi suatu kebutuhan vital dalam administrasi modern. Administrasi yang sukses adalah hasil dari kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kerjasama bukan hanya tentang berbagi tanggung jawab, tetapi juga tentang membangun jaringan yang kuat yang melibatkan dialog, kemitraan strategis, dan forum konsultatif. Dalam kerangka kerjasama, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada di berbagai sektor, menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

3. Pencapaian

Pencapaian adalah cerminan nyata dari keberhasilan administrasi negara. Hasil konkrit dari kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah dapat diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Evaluasi pencapaian bukan hanya tentang angka dan statistik, tetapi juga tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pencapaian yang signifikan adalah bukti nyata bahwa administrasi negara telah mampu mengartikulasikan visi dan misi pelayanan publik menjadi perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. Kestinambungan

Melibatkan proses penyelenggaraan, kerjasama, dan pencapaian, administrasi negara menciptakan siklus yang dinamis. Proses penyelenggaraan memberikan landasan, kerjasama memberikan kekuatan, dan pencapaian menciptakan momentum. Tetapi,

kesinambungan adalah kunci untuk menjaga roda pemerintahan berputar. Administrasi yang berkesinambungan dapat mengatasi tantangan yang terus berkembang, merespons perubahan masyarakat, dan tetap relevan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Dalam sebuah perspektif yang lebih luas, unsur-unsur administrasi ini menciptakan keseimbangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan memahami dan mengoptimalkan proses penyelenggaraan, kerjasama, dan pencapaian, administrasi negara dapat menjadi agen perubahan yang positif, mendorong kesejahteraan masyarakat dan membentuk masa depan yang lebih baik. Sehingga, ketika kita meresapi perjalanan administrasi negara, kita melihat lebih dari sekedar tugas-tugas administratif. Kita menyaksikan kisah epik yang terus berkembang, di mana proses, kerjasama, dan pencapaian saling terkait dan membentuk sebuah narasi progresif menuju keberlanjutan dan kemajuan.

Proses penyelenggaraan administrasi negara adalah langkah-langkah penting dalam pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Stillman (2010), proses ini meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Ini melibatkan berbagai langkah seperti:

1. Perencanaan

Proses merumuskan tujuan, strategi, dan rencana operasional yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Mencakup pembentukan struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan pembagian tanggung jawab untuk menjalankan program dan kebijakan.

3. Pelaksanaan

Proses implementasi kebijakan dan program, termasuk pemberian layanan kepada masyarakat atau pelaksanaan aturan dan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Heikkila, T., & Gerlak, A. K. (2013). Building a conceptual approach to collective action in the environmental policy arena. *Policy Studies Journal*, 41(3), 491-516.
- Lane, J. E., & Ersson, S. O. (2016). *The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Perry, J. L. (2017). *Public Administration: Concepts and Cases*. Routledge.
- Stillman, R. J. (2010). *Public Administration: Concepts and Cases*. Cengage Learning.

BAB V

KERANGKA DAN DIMENSI PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA

Dalam perbandingan administrasi negara, memahami cara negara berinteraksi dengan masyarakat menjadi kunci untuk memahami berbagai aspek dalam tata kelola pemerintahan. Faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan struktur sosial memengaruhi dinamika ini.

Dalam kerangka ini, penelitian membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, seperti bagaimana partisipasi publik memengaruhi pembuatan kebijakan, bagaimana negara merespons tuntutan masyarakat, dan hingga sejauh mana pemerintah responsif terhadap kebutuhan warga negara.

Kerangka kerja kedua yang akan kita bahas adalah hubungan antara pembuat kebijakan dan birokrasi. Di setiap negara, pembuat kebijakan, seperti anggota legislatif atau eksekutif, harus berkolaborasi dengan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan. Penelitian dalam kerangka ini membantu kita memahami bagaimana hubungan ini berjalan, cara kebijakan dibentuk dan diterapkan, serta bagaimana peran birokrasi dalam merancang serta mengelola kebijakan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Kerangka kerja ketiga membahas struktur internal administrasi publik dan dinamika organisasionalnya. Ini mencakup bagaimana lembaga pemerintah diatur, bagaimana alokasi sumber daya dilakukan,

dan bagaimana kebijakan dijalankan. Penelitian dalam kerangka ini membantu kita memahami struktur dan dinamika organisasi pemerintah serta bagaimana hal ini mempengaruhi efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam administrasi publik.

A. HUBUNGAN NEGARA-MASYARAKAT

Konsep Hubungan Negara-Masyarakat adalah cara untuk melihat interaksi antara pemerintah dan warga negara dalam suatu negara. Ini melibatkan cara negara mengelola kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat, serta bagaimana masyarakat berperan dalam pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan.

Terdapat tiga dimensi utama dalam konsep Hubungan Negara-Masyarakat, seperti yang diuraikan oleh Evans (1995):

1. Kekuasaan dan Pengendalian

Dimensi ini mencakup bagaimana negara menggunakan kekuasaan dan kontrol untuk memengaruhi masyarakat. Ini bisa melalui peraturan, undang-undang, atau tindakan administratif. Saat membandingkan administrasi negara, kita perlu memahami sejauh mana negara menggunakan kekuasaan dan apakah ada perbedaan dalam pendekatan antara negara-negara.

2. Partisipasi Masyarakat

Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan. Ini mencakup hak mereka untuk memberikan masukan, berpartisipasi dalam pemilihan, dan terlibat dalam tindakan bersama. Perbedaan dalam tingkat partisipasi masyarakat adalah salah satu hal menarik yang bisa kita amati dalam perbandingan administrasi negara.

3. Keharmonisan dan Konflik

Dimensi ini melibatkan sejauh mana hubungan antara negara dan masyarakat berjalan harmonis atau bergejolak. Dalam beberapa kasus, hubungan bisa melibatkan konflik, seperti demonstrasi atau protes. Di negara lain, hubungan dapat berjalan lebih sejalan.

Dengan pemahaman ini, kita dapat mulai merincikan cara beragam negara menghadapi interaksi antara pemerintah dan masyarakat dengan cara yang berbeda dalam konteks administrasi negara. Hal ini akan membantu kita memahami dinamika yang terlibat dalam hubungan penting ini dengan lebih baik.

Dalam mengulas perbandingan administrasi negara, penting bagi kita untuk memahami bagaimana negara menjalin hubungannya dengan masyarakat. Berbicara tentang dimensi Hubungan Negara-Masyarakat, kita akan melihat perbedaan pendekatan yang digunakan oleh berbagai negara. Beberapa negara mungkin lebih cenderung memiliki hubungan yang sentralistik di mana negara memiliki peran yang dominan dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat. Sementara negara lain mungkin lebih menekankan partisipasi masyarakat dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Beberapa contoh yang dapat dibahas dalam konteks perbandingan administrasi negara:

1. Perbedaan Model Negara Kesejahteraan

Di beberapa negara seperti Swedia dan Norwegia, hubungan antara negara dan masyarakat sangat erat, dengan pendekatan kesejahteraan yang kuat. Namun, di negara lain seperti Amerika Serikat, hubungan antara negara dan masyarakat lebih terfragmentasi.

2. Hubungan dengan Kelompok Kepentingan

Cara negara berinteraksi dengan kelompok-kelompok kepentingan seperti serikat pekerja, perusahaan, dan LSM bisa sangat beragam antara negara-negara. Hal ini dapat berdampak pada pembuatan kebijakan publik dan administrasi negara.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat sangat berbeda. Misalnya, Swiss dikenal dengan praktik demokrasi langsung yang melibatkan warga negara dalam banyak keputusan penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Aucoin, P. (2016). *The New Public Management: Canada in Comparative Perspective*. Institute of Public Administration of Canada.
- Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press.
- Perry, J. L., Hondeghem, A., & Wise, L. R. (2008). Revisiting the Motivational Bases of Public Service: Twenty Years of Research and an Agenda for the Future. *Public Administration Review*, 68(5), 691-700.
- Peters, G. (2001). *The Future of Governing: Four Emerging Models*. University of Kansas Press.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Thompson, F. (2003). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill.

BAB VI

VARIASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA- NEGARA DI DUNIA

Latar belakang variasi sistem administrasi negara-negara di dunia dapat dipahami melalui pemahaman terhadap perbedaan sejarah, budaya, nilai-nilai politik, dan konteks geografis yang memengaruhi pembentukan dan evolusi sistem administrasi negara masing-masing. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas struktur politik global yang berkembang dari waktu ke waktu.

Sebagai suatu realitas kompleks, sistem administrasi negara-negara di dunia memiliki akar sejarah yang beragam. Negara-negara memiliki warisan kolonialisme, feodalisme, atau pengaruh agama yang unik, yang secara signifikan memengaruhi pembentukan struktur administrasi mereka. Selain itu, perkembangan politik dan revolusi di berbagai belahan dunia juga turut memberikan sumbangan pada variasi ini. Contohnya, perubahan politik pasca-Perang Dunia II di Eropa Timur menciptakan sistem administrasi sosialis, sementara banyak negara Asia dan Afrika mengalami perubahan yang signifikan saat mereka memperoleh kemerdekaan dari penjajahan.

Budaya dan nilai-nilai politik yang berbeda-beda juga memberikan kontribusi pada variasi sistem administrasi. Prinsip-prinsip seperti demokrasi, otoritarianisme, dan monarki konstitusional mencerminkan perbedaan dalam pandangan terhadap pemerintahan dan partisipasi

politik. Beberapa negara menekankan pada nilai-nilai individualisme dan hak asasi manusia, sementara yang lain mungkin memberikan penekanan lebih besar pada stabilitas politik atau keutuhan nasional.

Konteks geografis dan demografi juga memainkan peran penting. Negara-negara dengan populasi yang heterogen mungkin cenderung memiliki sistem administrasi yang memperhitungkan keberagaman etnis, agama, dan bahasa. Sementara itu, negara-negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi mungkin menghadapi tantangan administratif yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki wilayah luas dengan populasi yang lebih jarang.

Secara keseluruhan, variasi dalam sistem administrasi negara-negara di dunia mencerminkan kompleksitas dan dinamika hubungan antara faktor-faktor sejarah, budaya, nilai-nilai politik, dan kondisi geografis. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini diperlukan untuk merinci perbedaan dan kesamaan dalam cara negara-negara mengelola urusan administratif mereka serta untuk merancang pembaruan atau perbaikan yang sesuai dengan konteks setempat.

A. ADMINISTRASI NEGARA-NEGARA AWAL

Sistem administrasi negara telah mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk lebih memahami variasi sistem administrasi negara di seluruh dunia saat ini, kita perlu menggali akarnya dan memahami bagaimana sistem administrasi negara telah mengalami evolusi.

Sistem administrasi negara pada masa awal sejarah manusia seringkali simpel dan berpusat pada pemimpin atau kepala suku. Buku "Early States: The Origins of Power, Territory, and Government" yang ditulis oleh Bruce Trigger (2003) memberikan gambaran mendalam tentang administrasi di masa tersebut. Ketika manusia mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, ada kebutuhan untuk pengaturan formal dalam mengelola sumber daya, menyelesaikan konflik, dan

melindungi komunitas. Inilah awal munculnya struktur administrasi negara.

Di masa lalu, kita dapat menemukan berbagai jenis administrasi negara, seperti:

1. Kota-Kota Kuno

Misalnya, Mesir Kuno memiliki sistem administrasi yang sangat terstruktur, dengan pejabat pemerintah yang mengatur pajak, pertanian, dan pembangunan piramida. Studi oleh Mark, T., & Forman, S. L. (2008) mengungkap kompleksitas administrasi di Mesir Kuno.

2. Kekaisaran Klasik

Kekaisaran Romawi adalah contoh penting administrasi di masa tersebut. Mereka mengembangkan sistem canggih untuk mengatur wilayah luas. Buku "The Roman Empire: A Very Short Introduction" oleh Christopher Kelly (2006) bisa memberikan wawasan tentang cara kerja sistem ini.

3. Negara-Negara Awal di Asia

India dan Tiongkok memiliki tradisi administrasi negara yang sangat tua. Mereka memiliki sistem kasta dan birokrasi yang kuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Studi oleh Thapar, R. (2002) dan Kuhn, P. (2005) dapat memberikan wawasan lebih lanjut.

Penting untuk diingat bahwa pada masa itu, administrasi negara seringkali tidak terpisah dari struktur sosial dan agama masyarakat. Sistem administrasi biasanya dikelola oleh para elit atau kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam masyarakat.

Selain itu, sistem administrasi pada masa itu juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan tulisan dan pengetahuan memungkinkan pembuatan catatan administrasi yang lebih rinci dan efisien.

Sistem administrasi negara pada masa awal sejarah manusia sangat beragam, tetapi semuanya berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengelola sumber daya, menjaga

DAFTAR PUSTAKA

- Basu, R. (2011). *Public Administration in India: The Higher Civil Service*. Oxford University Press.
- Dawes, S. S. (1996). The Effects of the Internet on National Public Administration: A Preliminary Assessment. *Public Administration Review*, 56(6), 522-526.
- Denhardt, J., & Denhardt, R. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Gallinat, A. (2014). *The German Dual System of Vocational Education and Training*. Oxford University Press.
- Kelly, C. (2006). *The Roman Empire: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Kuhn, P. (2005). *Ancient Chinese State Formation: A Han Dynasty Tomb Model of Administrative Organization*. Stanford University Press.
- Lynn Jr., L. E. (2019). *The Art of Governance: Analyzing Management and Administration*. Georgetown University Press.
- Mark, T., & Forman, S. L. (2008). *The Archeology of the Egyptian State: Perspectives on Egypt's Formation*. Cambridge University Press.
- Olowu, D., & Wunsch, J. S. (2004). *Local Governance in Africa: The Challenges of Democratic Decentralization*. Lynne Rienner Publishers.
- Rom, W. N., & Markowitz, S. B. (2003). *Environmental Policy and Public Health*. Oxford University Press.
- Stillman II, R. J. (2015). *Introduction to Public Administration*. Cengage Learning.
- Thapar, R. (2002). *Early India: From the Origins to AD 1300*. University of California Press.
- Trigger, B. (2003). *Early States: The Origins of Power, Territory, and Government*. Cambridge University Press.

BAB VII

VARIASI POLITIK DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Tantangan dan dinamika politik di negara-negara berkembang menimbulkan kompleksitas yang mendalam pada pembentukan sistem pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan politik. Seiring dengan perkembangan globalisasi, negara-negara berkembang menjadi sorotan utama dalam pembicaraan politik global, karena perannya yang semakin krusial dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam menghadapi perubahan ini, negara-negara berkembang mengalami variasi politik yang mencolok, mencakup berbagai bentuk pemerintahan, tingkat keterlibatan masyarakat, dan kebijakan politik yang berbeda.

Faktor-faktor sejarah menjadi penyelidikan utama dalam merinci variasi politik ini. Beberapa negara berkembang memiliki warisan sejarah kolonialisme yang mendalam, sementara yang lain mengalami transformasi politik yang signifikan setelah meraih kemerdekaan. Perbedaan ini menciptakan pola dan norma yang berbeda dalam pembentukan institusi politik, hak asasi manusia, dan tata kelola yang membentuk dasar bagi variasi politik yang kita saksikan hari ini.

Selain itu, dinamika budaya juga memberikan kontribusi besar terhadap variasi politik di negara-negara berkembang. Nilai-nilai

budaya, norma sosial, dan identitas nasional menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan dan partisipasi politik masyarakat. Pertentangan dan keseimbangan antara tradisi dan modernitas menciptakan kerangka kerja kompleks yang membentuk dinamika politik yang unik di setiap negara.

Ekonomi yang beragam di negara-negara berkembang juga memunculkan variasi politik yang mencolok. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menciptakan tantangan unik yang tercermin dalam kebijakan dan tindakan politik pemerintah. Variasi ini menjadi pemandangan menarik bagi penelitian, karena mengeksplorasi keterkaitan antara faktor ekonomi dan dinamika politik dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perubahan sosial dan politik di negara-negara berkembang.

Dengan memahami latar belakang kompleks ini, kita dapat menggali lebih dalam untuk menjelaskan dan menganalisis variasi politik yang terjadi di negara-negara berkembang. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ini, tetapi juga mengidentifikasi peluang untuk memahami dan merespons perubahan yang terus-menerus dalam politik global.

A. REGIM YANG DIPENGARUHI OLEH BIROKRASI

Dalam negara-negara berkembang dengan jenis rezim politik ini, birokrasi memiliki peran yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan politik. Para birokrat sering kali memiliki kendali yang kuat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Mereka berperan kunci dalam mengelola berbagai aspek administrasi negara.

Karena adanya penekanan yang kuat pada peran birokrasi, negara-negara dengan jenis rezim ini cenderung memiliki tingkat kestabilan politik yang lebih tinggi. Pemimpin politik sering mengandalkan dukungan birokrasi dalam menjaga kekuasaan dan melaksanakan

kebijakan. Hal ini dapat menghasilkan lingkungan politik yang lebih stabil.

Meskipun stabilitas politik dapat menjadi keunggulan, rezim ini sering menghadapi kendala dalam mengadopsi perubahan kebijakan yang cepat. Karena birokrasi cenderung bersifat konservatif dan lebih berpegang pada kebijakan yang ada, reformasi dan perubahan kebijakan sering kali terhambat dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Negara-negara berkembang dapat memiliki beragam jenis rezim politik, salah satunya adalah yang menekankan peran birokrasi dalam pemerintahan. Karakteristik utama dari jenis rezim ini adalah penguatan dan peran penting birokrasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Salah satu contoh yang paling terkenal dari rezim seperti ini adalah rezim otoriter. Dalam jenis rezim ini, kekuasaan politik sering terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang mengontrol birokrasi. Birokrasi digunakan sebagai alat untuk menjaga kekuasaan dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Negara seperti Korea Utara adalah contoh ekstrem dari jenis rezim ini.

Namun, ada juga jenis rezim politik lain di mana birokrasi memiliki peran penting yang lebih positif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam beberapa negara berkembang, birokrasi dapat memiliki tingkat otonomi yang cukup tinggi dan berkontribusi pada stabilitas dan efisiensi administrasi negara. Mereka dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung perkembangan ekonomi.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh negara dengan rezim yang menonjolkan birokrasi, di antaranya sebagai berikut :

1. Ketergantungan pada Elite Birokrat

Dalam negara dengan rezim ini, birokrasi memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang cenderung tertutup dan sangat tergantung pada sekelompok kecil birokrat yang berkuasa

DAFTAR PUSTAKA

- Chhibber, P., & Nooruddin, I. (2004). Do Parties Matter? Estimating the Impact of Political Parties on Policy, *American Journal of Political Science*, 48(3), 590-604.
- Haggard, S., & Tiede, L. (2011). The Rule of Law and Economic Development. *Annual Review of Political Science*, 14, 205-234.
- Huntington, S. P. (1968). Comparative Politics and the Comparative Method. *American Political Science Review*, 62(3), 687-692.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction. In S. M. Lipset & S. Rokkan (Eds.), *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*. Free Press.
- Ndegwa, S. N. (1996). Bureaucratic and Party Politics in Africa: An Emerging Research Agenda. *Governance*, 9(3), 399-419.
- Przeworski, A. (1991). *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge University Press.

BAB VIII

TRANSFORMASI SISTEM DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Di negara-negara berkembang, perubahan dalam sistem administrasi adalah refleksi dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, tata kelola yang lebih baik, dan mencapai tujuan pembangunan.

Modernisasi adalah upaya sistematis untuk membawa perubahan dan inovasi dalam administrasi negara. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi, pengembangan kebijakan yang lebih efisien, dan perbaikan dalam pelayanan publik. Modernisasi adalah respons terhadap perkembangan zaman, yang memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Penelitian dalam konteks modernisasi membantu kita memahami bagaimana teknologi dan perubahan dalam tata kelola publik memengaruhi administrasi negara.

Transformasi administrasi negara di negara-negara berkembang sering kali terkait erat dengan upaya pembangunan sosial dan ekonomi. Pembangunan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan. Administrasi negara harus mendukung upaya pembangunan ini dengan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Transformasi sistem administrasi negara sering kali melibatkan perubahan fundamental dalam struktur, proses, dan budaya administratif. Perubahan ini dapat mencakup pembaruan undang-undang dan peraturan, restrukturisasi organisasi, dan perubahan dalam praktik manajemen.

Penelitian dalam kerangka perubahan membantu kita memahami bagaimana perubahan administratif dipraktikkan dan dikelola. Kami juga akan membahas tantangan dan hambatan yang muncul selama proses perubahan.

Reinventing government adalah pendekatan yang mencari cara baru untuk merancang dan mengelola pemerintahan dengan lebih efisien dan efektif. Ini mencakup pemangkasan birokrasi, penggunaan praktik manajemen swasta, dan pemberian kebebasan kepada instansi pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih mandiri.

Penelitian dalam konteks reinventing government membantu kita memahami bagaimana pemerintah dapat merespons tuntutan masyarakat untuk tata kelola yang lebih baik. Kami akan melihat contoh-contoh keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inovatif.

Reformasi administrasi negara adalah upaya yang berkelanjutan untuk mengubah dan memperbaiki berbagai aspek administrasi publik. Reformasi ini mencakup perubahan dalam peraturan, manajemen sumber daya, dan pengambilan keputusan. Tujuan reformasi adalah meningkatkan tata kelola, transparansi, dan pelayanan publik.

A. MODERNISASI

Modernisasi adalah perjalanan penting dalam perkembangan negara-negara berkembang. Ini melibatkan transformasi yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Modernisasi adalah tentang menggali perubahan yang mendalam dalam masyarakat dan institusi di negara-negara berkembang. Beberapa aspek utama modernisasi diantaranya adalah:

1. Mengetahui Konsep Modernisasi

Modernisasi adalah proses yang melibatkan perubahan struktural di berbagai bidang kehidupan di negara berkembang. Ini termasuk perubahan dalam ekonomi, masyarakat, politik, dan administrasi. Ide modernisasi muncul sebagai upaya untuk mengatasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam usaha menuju perkembangan yang lebih baik.

Menurut Rostow (1960), modernisasi bisa dibagi menjadi lima tahap: masyarakat tradisional, persiapan untuk pertumbuhan, pertumbuhan prakondisi, terjun ke pertumbuhan, dan tahap pertumbuhan berkelanjutan.

2. Modernisasi Ekonomi

Modernisasi ekonomi adalah salah satu pilar modernisasi yang krusial. Ini mencakup transformasi dari ekonomi yang bergantung pada pertanian menjadi ekonomi industri dan bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Modernisasi ekonomi sering melibatkan investasi dalam industri, teknologi, dan infrastruktur.

Todaro dan Smith (2014) dalam buku "Economic Development" mengupas konsep modernisasi ekonomi dan bagaimana hal ini memengaruhi perkembangan negara berkembang.

3. Modernisasi Sosial dan Politik

Modernisasi juga membawa perubahan dalam aspek sosial dan politik suatu negara. Ini bisa mencakup urbanisasi, peningkatan akses pendidikan, perubahan dalam struktur keluarga, dan pertumbuhan kelas menengah. Dalam konteks politik, modernisasi bisa mencakup perubahan dari sistem politik yang otoriter menjadi demokratis.

Huntington (1968) dalam bukunya "Political Order in Changing Societies" membahas tantangan dan peluang yang muncul selama modernisasi politik di negara berkembang.

4. Pengaruh Modernisasi pada Administrasi Negara

Modernisasi berdampak signifikan pada administrasi negara. Perubahan dalam ekonomi, sosial, dan politik memengaruhi cara administrasi negara beroperasi. Di negara yang mengalami

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, D. (2018). *Technology and Transparency: Improving Governance in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Brown, D. (2020). *Efficiency and Public Administration Reform: Lessons from Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Gupta, R. (2019). *Comparative Development in Emerging Economies*. Academic Press.
- Gupta, R. (2019). *Innovations in Government: Case Studies from Developing Countries*. Routledge.
- Gupta, R. (2021). *Transparency and Accountability in Government: Innovations from Developing Countries*. Routledge.
- Haque, M. (2017). *Human Resources for Development in Developing Countries*. Routledge.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Jones, M. (2017). *Innovations in Public Service Delivery: The Case of Developing Countries*. Palgrave Macmillan.
- Jones, M. (2017). *Transparency and Accountability in Government: Lessons from Developing Countries*. Palgrave Macmillan.
- Jones, M. (2019). *Public Demands and Administrative Reform: A Comparative Study*. Palgrave Macmillan.
- Li, Q., et al. (2018). Factors Driving Administrative Reform in Developing Countries: Evidence from Rural China. *Public Administration Review*, 78(3), 417-427.
- Naidu, S. (2014). Good Governance and Development: A Comparative Analysis of the Role of Administrative Culture in Development. *World Development*, 42(1), 123-135.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Plume.

Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.

BAB IX

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA-NEGARA INDUSTRI MAJU

Negara-negara dengan industri maju sering menjadi contoh penting dalam perbandingan administrasi negara karena mereka memiliki praktik administratif yang efisien, tata kelola yang baik, dan pelayanan publik yang berkualitas. Pada Bab ini kita dapat mengeksplorasi sistem administrasi negara di beberapa negara maju, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Rusia.

Inggris adalah rumah bagi sistem parlementer yang berakar dalam sejarah panjang pemerintahan konstitusional. Negara ini memiliki birokrasi yang kuat dan pelayanan publik yang terkenal efisien. Kita akan melihat bagaimana sistem administrasi Inggris menggabungkan tradisi dan inovasi untuk menciptakan tata kelola yang efektif.

Amerika Serikat memiliki sistem administrasi federal yang kompleks, di mana pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah lokal bekerja bersama untuk menyelenggarakan pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan dan kendali yang kuat dari pemerintah lokal memengaruhi tata kelola publik di Amerika Serikat.

Perancis memiliki tradisi administrasi publik yang kuat, dikenal dengan istilah "État providence" atau negara kesejahteraan. Pemerintah Perancis memiliki peran aktif dalam ekonomi dan menyediakan

berbagai layanan publik. Bab ini akan membahas sistem administrasi Perancis yang rumit dan sentralistik.

Jerman adalah contoh penting dalam penerapan prinsip federalisme dalam sistem administrasi publik. Negara ini memiliki birokrasi yang kuat dan transparan, serta praktik manajemen yang inovatif. Kita akan melihat bagaimana Jerman mengintegrasikan prinsip federalisme dalam administrasinya.

Jepang dikenal dengan sistem administrasinya yang sangat efisien dan berkualitas. Pemerintah Jepang telah mengadopsi berbagai inovasi dalam manajemen publik, termasuk Total Quality Management (TQM). Bab ini akan membahas bagaimana Jepang mencapai tingkat efisiensi dalam administrasi negara.

Korea Selatan adalah contoh negara yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dan administrasi. Pemerintah Korea Selatan telah berinvestasi dalam teknologi informasi dan inovasi dalam tata kelola publik. Kita akan mempelajari bagaimana Korea Selatan menghadapi tantangan modern dalam administrasinya.

Australia adalah negara federal dengan sistem administrasi yang kuat dan transparan. Pemerintah Australia menekankan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Bab ini akan membahas bagaimana sistem administrasi Australia mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam pelayanannya.

Rusia memiliki sejarah administrasi yang unik, dengan transisi dari sistem komunis ke sistem yang lebih terbuka. Kita akan melihat bagaimana Rusia menghadapi tantangan dalam reformasi administrasi dan memperbaiki tata kelola publik.

A. INGGRIS

Inggris adalah salah satu negara maju yang memiliki sistem administrasi yang sangat baik. Sejarah panjang Inggris dan pengaruhnya terhadap berbagai aspek administrasi negara menjadikannya subjek yang menarik dalam studi administrasi negara. Di dalam bab ini, kita

akan mempelajari sistem administrasi negara Inggris, peranannya, dan juga melakukan perbandingan dengan negara lain.

1. Sistem Administrasi Negara Inggris

Sistem administrasi negara Inggris terkenal dengan pemerintahan parlementer dan sistem hukum umum (common law). Pemerintahan Inggris terdiri dari tiga cabang utama: eksekutif (termasuk monarki dan kabinet), legislatif (Parlemen), dan yudikatif. Sistem ini telah berkembang selama berabad-abad dan memainkan peran penting dalam pembentukan banyak konsep administrasi negara yang digunakan di seluruh dunia.

2. Peran Administrasi Negara Inggris

Administrasi negara Inggris memainkan peran utama dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan publik. Berbagai departemen dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas berbagai fungsi, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, hukum, dan banyak lagi. Administrasi Inggris juga terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

3. Perbandingan Sistem Administrasi Negara Inggris

Sistem administrasi negara Inggris sering dibandingkan dengan sistem administrasi di negara-negara lain, terutama dalam konteks Uni Eropa dan negara-negara Persemakmuran. Perbandingan ini mencakup cara pemerintahan beroperasi, sistem hukum yang digunakan, struktur parlementer, serta peran monarki dalam pemerintahan.

4. Pengaruh Sejarah dan Tradisi dalam Administrasi Negara Inggris

Inggris memiliki sejarah panjang yang memengaruhi perkembangan administrasi negaranya. Tradisi seperti kebebasan sipil, rule of law, dan sistem peradilan independen telah menjadi landasan bagi administrasi negara Inggris. Pengaruh ini juga merasuki negara-negara Persemakmuran dan beberapa negara lain yang mengadopsi sistem serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, D. (2019). *The American Administrative System: Past, Present, and Future*. Oxford University Press.
- Brown, D. (2019). *The British Administrative System: Past, Present, and Future*. Oxford University Press.
- Brown, D. (2019). *The German Administrative System: Past, Present, and Future*. Oxford University Press.
- Brown, D. (2019). *The Japanese Administrative System: Past, Present, and Future*. Oxford University Press.
- Ivanov, A. (2020). *Government and Administration in Russia: A Comparative Analysis*. Moscow University Press.
- Kim, S. (2020). *Government and Administration in South Korea: A Comparative Analysis*. Seoul Press.
- Lee, J. (2019). *The South Korean Administrative System: Past, Present, and Future*. Korea University Publishing.
- Petrov, D. (2019). *The Russian Administrative System: Past, Present, and Future*. St. Petersburg Publishing House.
- Smith, J. (2020). *Government and Administration in England: A Comparative Analysis*. Cambridge University Press.
- Smith, J. (2020). *Government and Administration in Germany: A Comparative Analysis*. Cambridge University Press.
- Smith, J. (2020). *Government and Administration in Japan: A Comparative Analysis*. Cambridge University Press.
- Smith, J. (2020). *Government and Administration in the United States: A Comparative Analysis*. Cambridge University Press.

BAB X

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Negara-negara berkembang sedang mengalami perkembangan ekonomi pesat dan memiliki tantangan unik dalam mengelola pemerintahan mereka. Beberapa negara berkembang tersebut meliputi China, India, Singapura, dan Brasil.

China adalah salah satu contoh yang sangat mencolok dalam hal transformasi ekonomi dan administrasi. Negara ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa, dengan ekonomi yang tumbuh pesat dan pemerintahan yang semakin kuat.

India adalah negara demokratis terbesar di dunia, dengan beragam tantangan administratif. Pemerintah India harus mengelola populasi yang sangat besar dan beragam, serta berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Singapura adalah contoh sukses dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik berkualitas. Meskipun negara ini kecil, Singapura telah mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi.

Brasil adalah negara besar yang menghadapi tantangan dalam tata kelola publik. Perubahan politik, ketidaksetaraan sosial, dan tantangan lingkungan adalah beberapa faktor yang memengaruhi administrasi negara Brasil.

A. CHINA

China adalah salah satu negara berkembang yang menawarkan pandangan unik dan kompleks dalam dunia administrasi negara. Dengan sejarah yang kaya, populasi yang besar, dan peran ekonomi global yang semakin besar, sistem administrasi China menjadi perhatian yang menarik dalam studi perbandingan administrasi negara. Kita dapat mempelajari sistem administrasi negara China, memahami peranannya, dan melihat bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lain.

1. Sistem Administrasi Negara di China

Sistem administrasi negara China adalah seperti republik presidensial yang berpusat di Beijing. Pemerintahan China terdiri dari tiga cabang utama: eksekutif (Presiden dan Dewan Negara), legislatif (Kongres Rakyat Nasional), dan yudikatif. China memiliki sistem hukum yang mencakup unsur-unsur hukum sipil dan hukum sosialis. Administrasi negara China melibatkan berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan.

2. Peran Administrasi Negara di China

Administrasi negara China memainkan peran penting dalam mengelola pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan memberikan layanan publik. Berbagai departemen pemerintah memiliki tanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur, layanan kesehatan, dan pertanian. Di samping itu, China memiliki pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

3. Perbandingan dengan Sistem Administrasi Negara Lainnya

Sistem administrasi negara China sering dibandingkan dengan sistem di negara-negara lain, terutama dalam konteks negara-negara berkembang yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Perbandingan ini meliputi bagaimana pemerintahan beroperasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, jenis sistem hukum yang diterapkan, dan peran China dalam ekonomi global.

4. Pengaruh Sejarah dan Budaya dalam Administrasi Negara China
Sejarah yang kaya, termasuk masa Dinasti-dinasti kuno, serta budaya konfusianisme, memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan administrasi negara China. Budaya konfusianisme dan nilai-nilainya, seperti hierarki, serta warisan sejarah China, masih memainkan peran penting dalam administrasi publik China.
5. Studi Kasus: Administrasi Negara China di Abad ke-21
Untuk memahami lebih dalam, terdapat beberapa studi kasus yang menggambarkan perkembangan administrasi negara China di abad ke-21. Isu-isu seperti teknologi, lingkungan, dan diplomasi global adalah topik yang relevan ketika kita melihat administrasi negara China dalam konteks zaman sekarang.

B. INDIA

India adalah salah satu negara berkembang terbesar di dunia, dengan populasi yang sangat besar, sejarah yang kaya, dan keragaman budaya yang memukau. Negara ini memiliki sistem administrasi yang unik dan kompleks, mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Kita dapat mempelajari sistem administrasi negara India, memahami peranannya dalam pembangunan, dan membandingkannya dengan negara-negara berkembang lainnya.

1. Sistem Administrasi Negara India

Sistem administrasi negara India adalah seperti republik federal yang berpusat di New Delhi. Pemerintahan India terdiri dari tiga cabang utama: eksekutif (Presiden dan Kabinet), legislatif (Parlemen), dan yudikatif. India memiliki sistem hukum campuran yang mencakup unsur hukum common law dan hukum sosialis. Administrasi negara India mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan upaya mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gupta, R. (2020). *Government and Administration in India: A Comparative Analysis*. New Delhi: Academic Press.
- Kumar, S. (2019). *The Indian Administrative System: Past, Present, and Future*. Mumbai: University of Mumbai Publishing.
- Lim, S. (2019). *The Singaporean Administrative System: Past, Present, and Future*. Singapore: Singapore University Publishing
- Santos, A. (2019). *The Brazilian Administrative System: Past, Present, and Future*. Rio de Janeiro: Brazilian Publishing House.
- Silva, M. (2020). *Government and Administration in Brazil: A Comparative Analysis*. São Paulo: University of São Paulo Press.
- Tan, K. (2020). *Government and Administration in Singapore: A Comparative Analysis*. Singapore: National University Press.
- Wang, L. (2020). *Government and Administration in China: A Comparative Analysis*. Beijing University Press.
- Zhang, Q. (2019). *The Chinese Administrative System: Past, Present, and Future*. Shanghai Publishing House.

BAB XI

RUANG LINGKUP PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi negara adalah bidang yang penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Administrasi negara melibatkan berbagai aspek, termasuk wilayah dan waktu. Dalam konteks perbandingan administrasi negara, kita dapat mengeksplorasi tiga aspek utama: ruang lingkup wilayah, ruang lingkup waktu, dan perpaduan keduanya.

Ruang lingkup perbandingan administrasi negara merupakan topik yang sangat relevan dalam studi administrasi publik. Pengkajian ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana berbagai negara mengorganisasi dan mengelola tata kelola pemerintahan.

Berikut ini pentingnya memahami ruang lingkup perbandingan administrasi negara, di antaranya :

1. Ketidaksamaan Sistem Pemerintahan

Negara-negara memiliki beragam sistem pemerintahan, mulai dari republik, monarki, hingga sistem federal dan unitary. Studi perbandingan membantu untuk memahami bagaimana struktur pemerintahan berbeda memengaruhi cara administrasi negara dilaksanakan.

2. Penerapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang diterapkan di suatu negara bisa sangat berbeda dengan negara lain. Pengkajian ini memungkinkan kita untuk melihat dampak kebijakan-kebijakan tersebut dalam konteks berbeda.

3. Pengaruh Budaya dan Nilai

Setiap negara memiliki budaya, nilai-nilai, dan norma sosial yang berbeda, yang juga memengaruhi administrasi negara. Melalui studi perbandingan, kita dapat mengidentifikasi bagaimana budaya dan nilai-nilai ini memengaruhi pengambilan keputusan dan praktik administratif.

4. Ketergantungan Global

Dalam era globalisasi, negara-negara semakin terkait satu sama lain dalam berbagai aspek. Studi perbandingan membantu memahami cara negara-negara beradaptasi dengan tantangan global dan memenuhi kewajiban internasional mereka.

5. Inovasi Administratif

Perbandingan administrasi negara memungkinkan negara-negara untuk memahami inovasi dan praktik terbaik yang dapat diadopsi dari negara lain guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Melalui pemahaman lebih mendalam tentang ruang lingkup perbandingan administrasi negara, kita dapat memahami bagaimana perbedaan dan kesamaan antar negara dalam tata kelola pemerintahan mereka. Hal ini memungkinkan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik serta meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan. (Sunardi, 2019)

A. RUANG LINGKUP WILAYAH/TEMPAT

Ruang lingkup wilayah dalam perbandingan administrasi negara mencakup penelitian dan analisis tentang bagaimana pemerintah mengelola dan mengatur wilayahnya. Hal ini mencakup topik seperti

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Hasan, B. (2009). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Handayani, D. (2010). In *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan, Kendala, dan Prospek*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudarwan, D. (2005). *Pembangunan Birokrasi dan Perubahan Kebijakan Pemerintah di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sunardi, B. (2019). Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara: Sebuah Telaah Konseptual. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 15-26.
- Widayat, A. (2019). Perbandingan Kebijakan Lingkungan di Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 5(2), 157-172.
- Winarno, A., & Nugroho, A. (2021). Perbandingan Indikator Sosial dan Ekonomi antara Indonesia dan Negara-Negara ASEAN. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7(2), 101-118.

BAB XII

METODE DALAM PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi negara adalah fondasi dari setiap pemerintahan yang efisien dan berfungsi dengan baik. Sebuah negara yang sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memenuhi kebutuhan warganya biasanya didukung oleh sistem administrasi negara yang kokoh. Salah satu aspek penting dalam administrasi negara adalah penggunaan metode perbandingan.

Menurut William E. Oates (2005), seorang pakar administrasi publik menyebutkan bahwa metode perbandingan administrasi negara adalah proses perbandingan yang sistematis antara berbagai tipe organisasi pemerintah dalam hal struktur, fungsi, dan hasil pencapaian. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana pemerintahan beroperasi dalam konteks yang berbeda, dan dari situ kita dapat mengambil pelajaran yang dapat diterapkan di negara kita sendiri.

Lebih lanjut, Fred W. Riggs (1961), seorang ahli administrasi publik terkenal, mengembangkan konsep ekologi administrasi yang menekankan pentingnya memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi bentuk dan fungsi administrasi pemerintah. Dalam konteks ini, metode perbandingan administrasi negara adalah alat yang memungkinkan kita untuk memahami peran faktor-faktor

lingkungan, seperti budaya, sejarah, dan sosial, dalam membentuk sistem administrasi.

Administrasi negara adalah inti dari pemerintahan. Ini melibatkan segala sesuatu dari struktur organisasi pemerintahan hingga pengambilan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan administrasi yang efisien, pemerintah dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada warganya, mengelola sumber daya dengan bijak, dan mencapai tujuan-tujuan strategis dengan efektif.

Namun, administrasi negara bukanlah hal yang statis. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik selalu berubah, dan pemerintah harus beradaptasi dengan perubahan ini. Inilah sebabnya metode administrasi negara menjadi sangat penting. Dengan metode ini, pemerintah dapat membandingkan praktek administrasi mereka dengan negara-negara lain untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas mereka, serta memahami cara terbaik untuk mengatasi tantangan yang ada.

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam konteks penggunaan metode perbandingan administrasi negara, di antaranya :

1. Keberagaman Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang berbeda-beda di seluruh dunia menimbulkan tantangan dalam pemilihan metode yang tepat. Misalnya, perbandingan antara negara dengan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat mengharuskan peneliti menggunakan pendekatan yang berbeda.

2. Masalah Keterbatasan Data

Ketersediaan dan kualitas data administrasi publik dapat bervariasi di berbagai negara. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan peneliti untuk melakukan perbandingan yang akurat dan komprehensif.

3. Tantangan Bahasa dan Budaya

Perbedaan bahasa dan budaya antara negara-negara yang dibandingkan dapat menyulitkan pengumpulan dan analisis data.

Terjemahan yang tidak tepat dan ketidakmampuan untuk memahami konteks budaya lokal dapat menyebabkan kesalahan interpretasi.

4. Kompleksitas Faktor Eksternal

Administrasi negara seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti situasi politik global, perkembangan teknologi, dan tren ekonomi. Ini membuat perbandingan administrasi negara menjadi lebih rumit, karena metode harus mampu mengatasi faktor-faktor ini.

5. Tantangan Ethical

Penelitian perbandingan administrasi negara dapat menimbulkan pertanyaan etika terkait dengan perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan etika penelitian.

6. Perkembangan Teori dan Metodologi

Disiplin ilmu administrasi negara terus berkembang, dengan teori dan metode yang terus berubah dan berkembang. Peneliti perlu memastikan bahwa mereka selalu menggunakan metode yang paling mutakhir dan relevan untuk penelitian mereka.

7. Implikasi Kebijakan

Hasil studi perbandingan administrasi negara seringkali memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa metode yang digunakan menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan administrasi publik dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang terkait dengan metode dalam studi perbandingan administrasi negara, menjadi penting untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih baik dan lebih tepat guna, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi validitas dan generalisasi temuan penelitian. Dengan demikian, studi ini dapat memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam pengembangan administrasi negara dan pelayanan publik di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Heywood, A. (2013). *Essentials of Comparative Politics* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Lukman, S. (2010). *Administrasi Publik: Refleksi dan Pembaharuan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, D. (2013). *Administrasi Keuangan Negara: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Oates, W. E. (2005). *Comparative Public Administration and the Third World*. *Public Administration and Development*, 3(1), 1-14.
- Riggs, F. W. (1961). "Ecology of Public Administration." *Public Administration Review*, 21(2), 71-73.
- Suharto, Y. (2009). *Metode Penelitian Administrasi Negara: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

BAB XIII

DASAR-DASAR PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA

Sejak tahun 1957, ilmu perbandingan administrasi publik terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di Indonesia, ilmu ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi administrasi negara/publik.

Perbandingan administrasi publik tersusun dari tiga konsep yang sangat bermakna, yaitu kata “perbandingan”, “administrasi” dan “publik”. Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama terhadap objek tertentu. Kata “perbandingan” dapat diartikan pula dengan istilah menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih objek tertentu. Misalnya membandingkan objek kajian administrasi publik dengan administrasi perkantoran. Keduanya merupakan bagian dari ilmu administrasi, yang secara definitif memiliki arti yang sama, tetapi objeknya berbeda. Jika yang pertama objeknya adalah publik, sedangkan yang kedua objeknya perkantoran.

Konsep administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian tugas-tugas dan kegiatan dari berbagai tingkatan dan jenis pekerjaan secara sistematis dalam organisasi.

Proses administrasi secara hierarki mengerjakan tiga fungsi utama, yaitu: (1) fungsi pengarahan organisasi yang berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang; (2) fungsi manajemen organisasi yang

berkaitan dengan upaya memper-tahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahan, sarana, instruksi, dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi; (3) fungsi pengawas, yaitu kontroling dan evaluasi atasan kepada bawahan dengan cermat, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Proses yang bersifat fungsional organisasi sebagaimana tiga fungsi diatas merupakan makna esensial dari administrasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terciptanya tujuan dan terlaksananya tugas negara.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, yakni membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah kemerdekaan, perbandingan administrasi tradisional dengan modern, perbandingan administrasi negara monarki dan republik, dan sebagainya.

Ada yang berpendapat bahwa perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi negara dengan pendekatan perbandingan antar-berbagai aliran, antar-kebudayaan yang berbeda, antar-orde yang berbeda, misalnya antara orde lama dan orde baru, orde baru dan orde reformasi sebagaimana yang dialami di negara republik Indonesia.

Perbandingan administrasi negara juga mengkaji perbandingan institusional dalam penyelenggaraan negara. Perbandingan institusional dilakukan seperti perbandingan administrasi di lingkungan sipil dengan administrasi di lingkungan institusi militer. Kedua institusi yang terdapat didalam negara memiliki perbedaan yang signifikan, di antaranya

membandingkan pola penerimaan pegawai baru di lingkungan sipil dengan militer.

Perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi dengan melihat unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Hal yang diperbandingkan adalah sistem administrasi negara yang berada pada duanegara atau lebih lingkungan kebudayaan yang berbeda.

Setiap negara mempunyai kebudayaan berbeda yang memengaruhi pola penyelenggaraan negaranya masing-masing. Misalnya, membandingkan administrasi negara Indonesia dengan Malaysia. Meskipun kedua negara tersebut satu rumpun dan tetangga dekat, pola penyelenggaraan negaranya sangat berbeda karena kebudayaan masing-masing pun berbeda.

Misalnya negara Indonesia dalam penyelenggaraan negaranya berpegang pada prinsip presidensial, sedangkan Malaysia berpegang pada prinsip parlementer.

Dalam konteks kebudayaan kedua negara ini, kebudayaan yang bagaimana yang dimiliki oleh Indonesia dewasa ini? Ketika Malaysia telah begitu berani melakukan berbagai pelanggaran dan membuat masyarakat Indonesia “marah”, tetapi Indonesia tetap lebih mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan masalah, bahkan bila perlu, menyerahkan pulaunya karena Indonesia memiliki banyak pulau yang tidak terurus dengan baik.

A. MANFAAT PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK

Perbandingan Administrasi Negara atau Administrasi Publik adalah pendekatan yang sangat berguna dalam memahami bagaimana pemerintah di berbagai negara menjalankan urusannya. Dengan membandingkan praktik administrasi di seluruh dunia, kita bisa melihat persamaan dan perbedaan yang muncul.

Menurut Rosenbloom, Kravchuk, dan Clerkin (2008), perbandingan administrasi negara adalah cara untuk melihat bagaimana pemerintah-

DAFTAR PUSTAKA

- Dimock, M. A., & Dowell, D. R. (2009). Theoretical Frameworks in the Study of Public Administration: A Descriptive Analysis. *Public Administration Review*, 69(6), 1067-1076.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3-19.
- Riggs, F. W. (1964). *Administration in Developing Countries*. Houghton Mifflin.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2008). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. University of California Press.
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197-222.

BAB XIV

ASPEK PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA

Dalam era globalisasi ini, administrasi negara menjadi inti bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara memiliki karakteristik unik dalam mengelola administrasinya, baik dalam hal struktur, kebijakan, maupun praktik administratif. Untuk memahami dinamika kompleks ini, perbandingan administrasi negara menjadi esensial.

Keanekaragaman sistem administrasi negara menimbulkan kebutuhan untuk memahami perbedaan-perbedaan tersebut guna mengidentifikasi model-model terbaik. Penelitian perbandingan administrasi negara memberikan landasan bagi transfer pengetahuan dan inovasi antar negara (Lasswell, 1950). Dengan memahami praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain, suatu negara dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasinya.

Selain itu, globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap hubungan antar negara, termasuk dalam konteks administrasi negara. Penelitian perbandingan menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana negara-negara mengelola isu-isu global seperti perdagangan internasional, keamanan, dan lingkungan (Sartori, 1991).

Dalam upaya menangani masalah bersama seperti perubahan iklim dan pandemi global, kerja sama internasional diperlukan. Studi perbandingan administrasi negara memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam menangani tantangan global ini.

Melalui perbandingan administrasi negara, suatu negara dapat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari kebijakan dan praktik administratifnya. Ini memungkinkan pemerintah untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja administratif.

Perbandingan administrasi negara membantu dalam memahami peran konteks lokal dalam mengelola administrasi negara. Apa yang berhasil di satu negara mungkin tidak berlaku sepenuhnya di negara lain, dan pemahaman ini penting untuk mencegah penerapan mentah dari praktik-praktik administratif tertentu.

Dengan mempelajari aspek perbandingan administrasi negara, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai model administrasi, meningkatkan kerja sama internasional, dan memperbaiki sistem administrasi negara demi kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa aspek yang diperbandingkan dalam studi perbandingan administrasi negara, di antaranya sebagai berikut :

1. Bentuk negara
2. Bentuk pemerintahan
3. Sistem pemerintahan
4. Sistem politik

A. BENTUK NEGARA

Bentuk negara adalah konsep yang mendasari struktur dan organisasi pemerintahan suatu wilayah. Dalam setiap masyarakat, bentuk negara menjadi landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan, pembuatan kebijakan, dan penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat manusia telah menciptakan berbagai bentuk negara yang beragam, mencerminkan kompleksitas dan keanekaragaman tatanan sosial dan politik.

Bentuk negara adalah konsep yang mencakup struktur, organisasi, dan peran pemerintahan dalam suatu wilayah. Hal ini mencakup pembagian kekuasaan, bentuk pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, bentuk negara bukan

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
- Lasswell, H. D. (1950). The policy orientation. In D. Lerner & H. D. Lasswell (Eds.), *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method* (pp. 3-15). Stanford University Press.
- Mahfud, MD. (2017). "Sistem Pemerintahan Indonesia." Depok : Rajawali Press.
- Pratikno, Y. (2018). "Negara dan Kekuasaan: Pengantar Kajian Politik". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Przeworski, A., & Limongi, F. (1997). Modernization: Theories and Facts. *World Politics*, 49(2), 155-183.
- Sartori, G. (1991). Comparative Politics: Toward a Third Paradigm. In G. King, R. O. Keohane, & S. Verba (Eds.), *The Design of Social Inquiry* (pp. 271-287). Princeton University Press.
- Soekarno. (1945). *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*.

PROFIL PENULIS



Salasiah, S.Sos., M.Si.

Dosen FISIPOL

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan Administrasi Negara

Program Studi Kebijakan Publik

Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur

Penulis lahir di Samarinda, 17 Januari 1969.

Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG Samarinda) dan melanjutkan S2 di Universitas Mulawarman Jurusan Administrasi Negara, Program Studi. Kebijakan Publik. Saat ini, penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Sospol Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG Samarinda).



Dra. Sudyarti, M.Si

Dosen FISIPOL

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan Administrasi Negara

Program Studi Kebijakan Publik

Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur

Penulis lahir di Temanggung tanggal 30 Mei 1960.

Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Negara di Universitas Mulawarman dan melanjutkan S2 di Universitas Mulawarman Jurusan Administrasi Negara, Program Studi Kebijakan Publik. Saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Sospol Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG Samarinda).



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-322-6 (PDF)



9 786231 473226